

Pernyataan Sikap Komponen WALHI Sulawesi Selatan

Salam Adil dan Lestari!!!

Komponen WALHI Sulawesi Selatan bersolidaritas dan mendukung rekan-rekan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dalam mempertahankan tanah dan bangunan. Kami juga mengecam tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Jakarta Selatan dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang melakukan pengusiran paksa dan pengambilalihan Kantor Pusat PKBI di Hang Jebat Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Rabu, 10 Juli 2024 pukul 07.00 WIB Kantor PKBI didatangi sekitar 100 orang personil gabungan Satpol PP, Kepolisian dan TNI. Barang-barang milik PKBI dikeluarkan secara paksa dan tidak manusiawi, tentu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah mencederai nilai-nilai demokrasi yang dianut republik ini.

Perlu diketahui bahwa PKBI sejak 23 Desember 1957 berdiri. Salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang selama ini bekerja untuk memperjuangkan permasalahan kesehatan, keadilan sosial dan kesejahteraan di Indonesia. Selama 67 Tahun PKBI melakukan edukasi, kampanye dan advokasi penghapusan kekerasan seksual, penanggulangan HIV/AIDS, serta hak atas kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia dan yang memelopori gerakan Keluarga Berencana (KB). Kontribusi PKBI dalam memperjuangkan kesehatan yang layak dan berkualitas bagi semua orang harus mendapatkan perlakuan baik dari pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sayangnya kontribusi PKBI selama puluhan tahun untuk bangsa ini justru dibalas dengan tindakan represif oleh pemerintah.

Perlu ditegaskan bahwa tanah dan bangunan PKBI di Jalan Hang Jebat merupakan “Hibah” dari Gubernur DKI Ali Sadikin sejak 1970, dan saat ini PKBI memiliki Training Center sebagai pusat layanan bagi warga terutama perempuan dan anak di seluruh Indonesia. Sehingga PKBI menempati tanah dan bangunan tersebut secara sah berdasarkan SK Gubernur DKI No.Ad.7/2/34/70.

Tindakan kekerasan atau pengusiran paksa yang dilakukan oleh pemerintah sungguh mencederai nilai-nilai demokrasi yang dianut bangsa ini, hak-hak dasar masyarakat yang diperjuangkan oleh PKBI adalah hak demokrasi, apalagi PKBI selama 67 tahun belakangan ini mendukung program-program yang dijalankan oleh pemerintah, seperti vaksinasi, penanganan stunting, edukasi remaja, pelayanan SRHR dan menyediakan tenda kemanusiaan saat bencana.

Melihat peristiwa diatas, Kami **MENOLAK KERAS** upaya pengusiran paksa yang dilakukan oleh Pemerintah. Atas peristiwa yang menimpah PKBI, WALHI Sulawesi Selatan Menyatakan Sikap:

1. Mengecam tindakan pengusiran paksa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan dan Kementerian Kesehatan RI melalui aparat gabungan (Satpol PP, Kepolisian dan TNI) kepada staf dan Kantor Pusat PKBI.
2. Bersolidaritas dan mendukung PKBI untuk mempertahankan hak atas kantor sebagai pusat pendidikan dan aset-aset yang ada di dalamnya.
3. Mendesak Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin membatalkan upaya pengambilalihan paksa Kantor Pusat PKBI dan memberikan hak atas tanah kepada PKBI.
4. Mendesak Pemerintah DKI untuk segera mencabut Pergub DKI 207/2016
5. Mendesak Presiden Republik Indonesia, Jokowi Widodo turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut sebagaimana tindakan nyata yang diambil oleh Presiden Abdurrahman Wahid.

Demikianlah Pernyataan Sikap ini kami buat agar dapat dipahami oleh semua pihak. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih!

Makassar, 13 Juli 2024